

EVALUASI PENYALURAN DANA LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT

Saliman, Sukimin

Fakultas Pertanian, Universitas Cokroaminoto Palopo

Abstrak: Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah (a) Sebagai bahan informasi bagi gabungan kelompok tani sekaligus menjadi; (b) petunjuk teknis dalam pengelolaan bantuan pemerintah; (c) Sebagai bahan kajian bagi penulis dalam melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di 3 Gapoktan Penerima Dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang disalurkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara, dengan pertimbangan bahwa gabungan kelompok tani tersebut merupakan Gapoktan yang telah berpengalaman mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan. Maka dapat disimpulkan Pengelolaan Dana LDPM yang digulirkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara dapat dikelola dengan baik, serta mampu menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim. Hal ini terbukti dengan masih adanya stok gabah pada gudang gapoktan.

Kata Kunci: Evaluasi, Penyaluran Dana, LDPM, Pangan

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin, semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata oleh karena kecukupan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat strategis (Anonim, 2006).

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kaitan antara ketahanan pangan dengan ketahanan nasional sangatlah erat, karena itu pemerintah Indonesia sejak awal selalu berupaya mewujudkan ketahanan pangan dengan memprioritaskan pembangunan bidang pertanian (Anonim, 2008).

Perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki konsumsi pangan dan status gizi masyarakat, yang akan memberikan kontribusi yang teramat penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Tanpa landasan yang kuat, maka pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi pastilah sangat rapuh. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kondisi ini harus diciptakan agar masyarakat Indonesia benar-benar maju, mandiri dan sejahtera lahir batin (Sawit, MH, 2007).

Ketahanan Pangan nasional saat ini dicirikan dengan ketersediaan pangan yang cukup secara makro, namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Kemiskinan merupakan penyebab utama rendahnya akses pangan masyarakat. Secara relatif situasi h.i.skinan di Indonesia menunjukkan perbaikan dan 16,7% pada tahun 2005 menjadi 15,4 % pada tahun 2008, akan tetapi secara nominal jumlahnya masih cukup besar, sekitar 35 juta dan lebih dan 60% (Data Sekunder BPS. Tdwn 2008). Sebagaimana besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen maupun konsumen pangan.

Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani. Mereka menghadapi berbagai masalah diantaranya :

- a. Rendahnya posisi tawar terutama pada saat panen raya sehingga terpaksa menjual hasil usaha taninya dengan harga yang rendah;
- b. Rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasil pertanian;
- c. Keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha;
- d. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan, kurangnya semangat memperbaiki produksi dan rendahnya kualitas sumberdaya petani itu sendiri. Kondisi ini apabila dibiarkan berkelanjutan akan semakin memperlemah ketahanan pangan rumah tangga petani dan dalam skala yang lebih besar dapat mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Luwu Utara.

Dalam mengatasi masalah tersebut diatas, Departemen Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan mengalokasikan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan APBN Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Dana bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dalam mengelola kegiatan distribusi agar memperoleh harga yang pada saat panen raya, menghasilkan nilai tambah serta memupuk cadangan pangan. Dengan dukungan tersebut diharapkan anggota Gapoktan meningkatkan pendapatannya sekaligus memperkuat akses pangan di saat peceklik. Selanjutnya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga tani meningkat dan semangat untuk berproduksi tentu berlanjut sehingga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan lokal.

Neraca Bahan Makanan (NBM) nasional tahun 1999 menunjukkan ketersediaan energi dan protein perkapita perhari masing-masing 3.197 kalori 85,4 gram protein. Hal ini menunjukkan secara nasional ketersediaan pangan telah menjadi tingkat kecukupan energi yang dianjurkan yakni 2.550 Kalori/kapita/hari dan protein 559/kapita/hari. Dan segi kuantitas memang lebih dari dan cukup, tetapi dan sisi kualitas belum sepenuhnya memenuhi nilai gizi Indeks mutu konsumsi pangan berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) baru mencapai 62,4 dan skor 100 yang ideal dan ditargetkan untuk dicapai tahun 2020. Masalah ini disertai pula dengan masih tingginya masalah dan rendahnya indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia (berada pada peringkat 107 dari 174 negara), yang lebih but-uk dibanding Vietnam (Ariani M, 2000).

Masalah pangan tersebut terutama diakibatkan oleh kebijakan pangan dimasa lalu yang belum memberikan perhatian yang seimbang pada tatanan program pada pangan non beras, terutama diversifikasi pangan dan lemahnya program pendidikan non gizi

dan pangan bagi masyarakat. Kebijakan ini lebih lanjut telah mengubah pola konsumsi masyarakat, berbagai bahan lokal seperti jagung, umbi-umbian, sagu dan sebagainya dianggap oleh masyarakat sebagai bahan pangan inferior dan selanjutnya pola konsumsi masyarakat didominasi oleh bahan pangan beras. Hal ini merupakan suatu alternatif untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, akibat naiknya harga beras dipasaran. Masyarakat yang memiliki tingkat penghasilan yang rendah melakukan perubahan dalam pemenuhan gizi dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal lainnya sebagai

substitusi karbohidrat karena tidak mampu membeli beras. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan dapat berubah sesuai dengan yang terkait sehingga ada upaya penganekaragaman pangan. Pendukung pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan arah dan kepada aparat daerah, pendamping dan gabungan kelompok tani pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang merupakan tindak lanjut dan Pedoman Umum dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Tahun 2009.

Adapun Tujuan Kegiatan Penguatan-PLDPM adalah:

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan Gapoktan/poktan untuk membangun unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup (produksi, penyimpanan, pengolahan dan penjualan hasil pertanian). Dalam rangka mendorong stabilitas harga pangan strategis;
- Meningkatkan kemampuan Gapoktan mengembangkan unit usaha di bidang pangan untuk menyimpan pangan (gabah beras) dalam memenuhi kebutuhan anggotanya;
- Meningkatkan unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha saran milik Gapoktan dalam mengembangkan jejaring distribusi dengan mitra luar wilayahnya.

Kebijakan, Pendekatan dan Strategi

Kebijakan yang mendasari Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dan hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, dan (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan sehingga dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat menghadapi paceklik (Nainggolan, 2008). Model pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar mereka mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan. Kelompok masyarakat disadarkan agar berorientasi mandiri tidak mengharapkan bantuan, dan fasilitasi agar dapat berkembang secara swadaya. Untuk itu mereka dilatih untuk mengembangkan kerjasama dalam kelompok, menghimpun dan mengelola dana kelompok secara transparan, dengan aturan dan sanksi yang ditentukan sendiri secara musyawarah. Disamping itu juga ditingkatkan keterampilan teknis termasuk pendayagunaan teknologi, serta kemampuan membangun kemitraan dan bernegosiasi dengan pihak lain untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Strategi yang dilaksanakan antara lain : (a) memberikan dukungan kepada unit usaha Gapoktan untuk memperkuat kemampuan mengelola distribusi hasil panen anggotanya secara berkelanjutan, dan (b) memperkuat kemampuan Gapoktan

dalam mengelola cadangan pangan sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan. Berdasarkan strategi tersebut, maka komponen kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) adalah (a) penguatan kemampuan kelembagaan Gapoktan, (b) penguatan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dalam melakukan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung petani pada saat panen raya. Harga pembelian produk petani minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras dan atau harga referensi daerah (FIRD) untuk jagung, (c) peningkatan kemampuan mengelola sebagian gabah/beras untuk cadangan pangan Gapoktan sehingga mendekatkan akses pangan bagi anggotanya saat paceklik, dan (d) peningkatan kemampuan unit usaha milik Gapoktan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan volume cadangan pangan secara berkelanjutan (Nainggolan, 2008)

Sasaran Pelaksanaan

Sasaran dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2009 di Kabupaten Luwu Utara adalah Gapoktan yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten dan telah memenuhi kriteria verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi.

Ruang Lingkup Sub stansi Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan-LDPM meliputi sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kegiatan Gapoktan;
- b) Penetapan Indikator Keberhasilan Gapoktan;
- c) Pengorganisasian kegiatan Gapoktan;
- d) Pelaksanaan Kegiatan Gapoktan termasuk (Anggaran, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengawasan, serta Pelaporan Kegiatan),

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja antara lain;

Indikator Masukan (Input):

- a. Dana Bansos 2009 bagi 3 Gapoktan sentra produksi padi dan jagung di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Rekrutmen Petugas Pendamping Penguatan-LDPM yang diusulkan dan ditetapkan oleh Tim Teknis Kabupaten.

Indikator Keluaran (Output):

- a. Meningkatnya volume pembelian dan penjualan gabah/ beras/ jagung di 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Meningkatnya volume cadangan pangan di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Luwu Utara.

Indikator Hasil (Outcome)

- a. harga gabah/beras/jagung di wilayah Gapoktan stabil pada saat panen
- b. adanya gaba/beras/jagung di gudang penyimpanan.
- c. Modal usaha Gapoktan meningkat.
- d. posisi tawar petani meningkat.
- e. nilai tambah produk pertanian meningkat.
- f. Akses anggota Gapoktan terhadap beras meningkat.
- g. Kemampuan manajemen Gapoktan meningkat.

Indikator Dampak (Impact):

- a. Terwujudnya stabilitas harga pangan wilayah.
- b. Terwujudnya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani (Nainggolan, 2009)

Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati manusia dan air, baik yang diolah maupun tidak yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengelolaan dan pembuatan makanan dan minuman (Anonim, 2006).

Subsistem konsumsi pangan terletak pada hilir dan sistem ketahanan pangan yang berarti langsung mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Konsumsi pangan masyarakat dapat dipantau dan pola konsumsi pangan daerah yang bersangkutan, yang mencakup ragam, jenis pangan dan jumlah pangan yang dikonsumsi serta frekuensi dan waktu makan secara kuantitatif kesemuanya menentukan ukuran tinggi rendahnya pangan yang dikonsumsi.

Pemantapan ketahanan pangan akan efektif apabila dimulai pada tingkat rumah tangga, untuk itu perlu diusahakan ketersediaan pangan yang beragam dan terjangkau oleh seluruh anggota keluarga. Upaya yang paling tepat adalah pengembangan pangan alternatif ditumbuhkan (Anonim, 2006)

a. Pemilihan Bahan Pangan

Setiap individu selalu berusaha memilih bahan pangan yang baik untuk dibeli dan dikonsumsi, akan tetapi yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan bahan pangan adalah masalah harga yang arahnya kepada daya beli masyarakat. Selain masalah harga ada beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih bahan pangan yang baik (Hadi Riyadi, 2002) diantaranya

a) Faktor Fisiologi

Setiap individu akan tertarik dan ingin menikmati suatu makanan yang diakibatkan oleh tampilan warna atau rupa makanan.

b. Pendidikan

umum pengelolaan makanan dalam rumah tangga sehari-hari diindikasikan oleh ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan gizi dan kesadaran gizi yang tinggi dan memilih kebiasaan makan yang sehat sedini mungkin kepada semua anggota keluarga. Itu berperan penting dalam penentuan gizi yang baik bagi anggota keluarga, sehingga perlu dibekali pendidikan mengenai status gizi baik, pola makan berimbang dan tata yang baik.

c. Faktor Pendapatan

Bahan pangan bagi golongan rumah tangga mungkin berasal dari usahatani yang dikelola sendiri tetapi ada juga yang dibeli dari warung, toko atau pasar. Bagi masyarakat desa bahan pangan masih dapat dihasilkan sendiri. Mutu pangan yang baik yang dijual di warung, toko atau pasar biasanya harganya relatif lebih mahal. Disinilah peranan pendapatan keluarga dalam penentuan dan pemilihan bahan pangan. Keluarga yang penghasilan cukup atau tinggi lebih mudah dalam menentukan pemilihan bahan pangan sesuai dengan syarat mutu yang baik.

d. Faktor Sosial Budaya

Setiap bangsa mempunyai kebiasaan makan, pola makan dan cara makan berlainan. Hal ini dipengaruhi oleh iklim dan budaya. Budaya suatu keluarga, kelompok masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap apa, kapan dan bagaimana penduduk makan. Kebudayaan tidak hanya menentukan pangan apa, tetapi juga siapa dan dalam keadaan bagaimana pangan tersebut dimakan. Letak geografis mempengaruhi bahan pangan yang akan dikonsumsi, cara memasak, cara menghidangkan maupun cara makannya.

e. Jenis dan Tanda-Tanda Kerusakan Bahan Pangan

Suatu bahan pangan dianggap rusak bila telah menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang digunakan oleh manusia.

Beberapa bahan pangan dianggap rusak bila telah menunjukkan penyimpangan konsistensi serta tekstur dan keadaan normal. Bahan pangan secara normal terkonsistensi awalnya adalah kental, tetapi akibat sesuatu hal sehingga berubah menjadi encer, maka hal itu merupakan suatu tanda kerusakan. Demikian juga bahan pangan yang secara normal mempunyai tekstur keras seperti ubi jalar dan lain-lain kemudian menjadi lunak, meskipun masih dalam keadaan segar, maka bahan tersebut bisa dianggap telah mengalami kerusakan.

Berdasarkan faktor penyebabnya, maka kerusakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Kerusakan Biologi

Kerusakan ini disebabkan oleh serangan serangga, binatang pengerat atau hewan lain. Serangga dan binatang pengerat dapat menyerang bahan pangan, baik di lapangan maupun dalam gudang.

b. Kerusakan Fisiologi

Merupakan kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi enzim yang terdapat didalamnya secara alamiah, sehingga terjadi proses autolisis berakhir dengan kerusakan dan pembusukan.

c. Kerusakan Mikrobiologi

Kerusakan mikrobiologi disebabkan oleh pertumbuhan dan aktivitas jasad renik (bakteri, kapang dan jamur). Selain adanya beberapa jasad renik yang bersifat patogen (menyebabkan sakit), juga ada yang dapat memproduksi senyawa beracun (toksin) yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan-bahan yang telah rusak oleh mikroba dapat menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan-bahan lain yang masih sehat atau segar. Karena bahan yang sedang membusuk mengandung mikroba-mikroba yang masih muda serta dalam fase pertumbuhan ganas, sehingga dapat menjalar dengan cepat ke bahan-bahan lain yang ada didekatnya.

d. Kerusakan Fisik

Jenis kerusakan ini disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan dan sebagainya.

e. Kerusakan Mekanis

Kerusakan mekanis disebabkan karena adanya benturan-benturan mekanis misalnya benturan antara bahan pangan itu sendiri atau karena benturan alat dengan bahan pangan tersebut, cara pelemparan bahan pangan ke dalam ongkongan atau wadah, banyak menyebabkan terjadinya saling benturan satu sama lain atau antara bahan pangan dengan dinding wadah. Beberapa bahan pangan seperti umbi-umbian banyak mengalami kerusakan karena tersobek atau terpotong oleh cangkul atau alat penggal lain pada saat dilakukan pemanenan.

3. Ciri-Ciri Bahan Pangan Yang Baik

Guna menciptakan makanan yang berkualitas tinggi, salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah cara pemilihan bahan pangan tersebut yaitu dengan memperhatikan ciri-ciri bahan-bahan pangan yang baik dan segar. Dalam

pembahasan ini dikhususkan pada bahan pangan alternatif yang banyak terdapat pada daerah penelitian yakni:

- Jagung
Tanda-tanda jagung yang segar adalah jagung yang kulitnya segar, berwarna putih atau kuning, bijinya bernaas dan mengkilat, serta tongkolnya utuh dan tidak terserang oleh ulat.
- Ubijalar
Umbi kelihatan bersih dan mulus, kulitnya tidak berkeriput, tidak berlubang dan tidak terlalu banyak mata.

4 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kajian mengenai gabungan kelompok oleh para ahli dan tinjauan sosiologi, psikologi sosial maupun tinjauan teori komunikasi ada kecenderungan mengatakan bahwa suatu gabungan kelompok yang termasuk dalam pengertian kelompok kecil, selalu memiliki tujuan yang sama. perbedaan mungkin dan sudut fungsi, tugas, peran setiap anggota, struktur yang paling dimainkan dan sebagainya.

Karakteristik kelompok seperti (Yusuf, 2001):

1. Suatu kelompok terdiri dan dua orang atau lebih
2. Berinteraksi satu sama lain
3. Membagi beberapa tujuan yang sama
4. Melihat dirinya sebagai kelompok

Pembatasan pengertian kelompok dapat dilihat dan pengertian saling gantungan (Inter Dependency). Jadi kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dalam rangka mencapai tujuan sama-sama.

Bentuk-bentuk gabungan kelompok dan karakteristiknya:

1. Gabungan Kelompok Formal dan Informal

Gabungan Kelompok Formal adalah suatu gabungan kelompok yang sengaja dibentuk untuk pelaksanaan dan realisasi tugas tertentu, dimana anggotanya diangkat dan dilegitimasi oleh badan atau organisasi tertentu misalnya komite atau panitia unit kerja tertentu.

Gabungan Kelompok Informal adalah suatu gabungan kelompok yang timbul dan proses interaksi, daya tank dan kebutuhan-kebutuhan seorang, dimana anggota tidak dilegalisir oleh badan tertentu, misalnya kelompok tani, kelompok pembaca dan pemirsa dan sebagainya.

2. Gabungan Kelompok Terbuka dan Tertutup

Gabungan Kelompok terbuka adalah suatu gabungan kelompok yang sara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan, sedangkan kelompok tertutup yakni dalam menerima perubahan dan pembaharuan cenderung mempertahankan kestabilan yang ada atau dapat diantikan tidak mau menerima sesuatu atau campur tangan dan luar.

Gabungan Kelompok tani adalah petani dan masyarakat tani yang Mat dalam proses pembaharuan, berinovasi dan bergerak maju dalam apkan teknologi usahatani yang barn (Dudung A, 2000).

Gabungan Kelompok tarn dibentuk karena dua aspek utama, yakni:

1. Karena sehamparan. Dasan pembentukan gabungan kelompok tani mi didasarkan pada adanya lahan usahatani yang berada pada satu hamparan, bingga memudahkan bagi para petam untuk berkumpul.

2. Karena Domisili. Dasar pembentukan gabungan kelompok mi didasarkan pasamaan domisili atau tempat tinggal, yang merupakan pendorong bagi mereka bersatu dalam kaitannya dengan upaya perbaikan usahatani.

Gabungan Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang bersifat informasi dimana ikatan dalam gabungan kelompok tersebut terbentuk karena pandangan, kepentingan dan kebutuhan yang sama. Tindakan bersama yang dilakukan dalam gabungan kelompok tani dimaksudkan untuk menjamin efisiensi dalam pengelolaan usahatani dan para anggotanya.

5. Fungsi Gabungan Kelompok Tani

Setiap lembaga baik formal maupun non formal dalam keberadaannya memiliki fungsi tertentu, demikian halnya dengan gabungan kelompok tani. secara garis besar, gabungan kelompok tani berfungsi sebagai:

1. Wahana sama
2. Wahana belajar mengajar
3. Unit produksi
4. Unit usaha

Wahana keijjasama, karena dalam gabungan kelompok terhimpun beberapa orang didalamnya sehingga akan muncul kebersamaan dalam bekerja Sehingga penyelesaian pekerjaan yang mestinya membutuhkan waktu yang agak panjang dalam menyelesaikannya jika hanya sendiri memungkinkan untuk cepat terselesaikan jika dikerjakan secara bersama-sama.

Proses belajar mengajar terjadi karena diantara para anggota dan pengurus, ada yang memiliki pengalaman, pengetahuan atau kelebihan- kelebihan yang dapat dibagi atau didiskusikan antara sesama anggota kelompok yang memungkinkan anggota untuk mengetahui sesuatu ilmu yang selama ini tidak pernah dimilikinya.

Dikatakan suatu unit produksi, karena dalam suatu gabungan kelompok petani yang bergabung dalam proses usahatannya memiliki suatu yang sama yakni ingin memproduksi sesuatu entah itu tanaman, ternak produk-produk lainnya yang bisa memberi suatu penghasilan. Sehingga produk akhir yang nantinya akan dihasilkan lalu dikelola dengan baik dengan penerapan pasca panen yang baik sehingga bisa bernilai komersil dengan sendirinya akan terjadi suatu unit usaha

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 3 Gapoktan Penerima Dana Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang disalurkan oleh Badan kehutanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara, pertimbangan bahwa gabungan kelompok tani tersebut merupakan gapoktan yang telah berpengalaman mengelola dana Bantuan Langsung masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan Lembaga Usaha Ekonomi perdesaan.

Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan yakni dari bulan Maret sampai bulan Mei 2010.

Penentuan responden dalam penelitian mi secara purposive, dengan nihil 3 Gapoktan yang mengelola dana Bantuan Sosial Lembaga distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009.

Penelitian mi menggunakan sumber data antara lain:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan petani responden dengan menggunakan daftar pertanyaan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dengan judul penelitian diantaranya Kantor Kecamatan Lokasi kegiatan LDPM, Kantor Statistik dan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif. yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pemaparan tentang mekanisme dan tata cara penyaluran dana LDPM serta peran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan dana LDPM.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis maka batasan definisi operasional yang menjadi pendukung penelitian adalah:

1. Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM): Bagian dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Usaha Pedesaan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2009 yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gabungan kelompok tani dalam mengembangkan usaha distribusi dan mengelola cadangan pangan. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM) dibiayai dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 melalui mekanisme dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan langsung kepada Gapoktan
3. Dana bantuan sosial (bansos) yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini: uang yang ditransferkan kepada gapoktan untuk penguatan unit usaha distribusi hasil pertanian atau unit usaha pemasaran dan atau unit usaha pengolahan serta pengelolaan cadangan pangan. Fasilitas bantuan sosial ini merupakan bagian dan upaya pembudayaan Gapoktan dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia melalui pembinaan, pemantauan, evaluasi dan dukungan.
4. Dana dekonsentrasi: dana yang berasal dan APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah (PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
5. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) : Harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Perberasan
6. Harga Referensi Daerah (FTRD) : Harga Referensi Daerah untuk komoditas jagung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati.
7. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) : Kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha (Permentan Nomor 273fKpts/OT. 160/4/2007).
8. Kelompok tani (Poktan) : Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Permentan Nomor : 273fKpts/OT. 160/4/2007)

9. Unit usaha distribusi hasil pertanian milik gapoktan : unit usaha yang dibentuk atas keinginan dan anggota gapoktan untuk melakukan pembelian dan penjualan hasil produksi (gabah/beras/jagung) anggotanya sehingga memngkatkan posisi tawar dan nilai tambah produk petani.
10. Unit usaha pengelolaan hasil pertanian milik Gapoktan : unit usaha yang dibentuk oleh anggota Gapoktan yang bertujuan untuk mengolah/menggiling/mengepak gabah/beras/jagung hasil produksi petani anggotanya, sehingga meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produk petani.
11. unit pengelolaan Cadangan pangan unit pengelolaan cadangan pangan ii dibentuk oleh anggota Gapoktan/Poktan yang bertujuan untuk menyimpan pangan dalam jumlah yang cukup guna menjamin akses pangannya bagi anggotanya sepanjang waktu khususnya saat menghadapi paceklik
12. Sentra produksi pangan (padi atau jagung) : Provinsi dan atau Kipaten/Kota yang pangannya didominasi oleh komoditas padi atau jagung
13. Pemberdayaan masyarakat : upaya menciptakan/memngkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka mampu menganali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif dan pemupukan cadangan pangan serta memecahkan bagai persoalan yang dihadapi
14. pendamping : Penyuluh pertanian dan atau petugas yang berpengalaman a bidang penyuluhan tanaman pangan yang sehari-hari bertugas di wilayah Gapoktan.
15. pendamping: Proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan poktan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan, ntukan aturan dan sanksi, memupuk dan mengatur dana sendiri, nupuk rasa tanggung jawab dan organisasi gapoktan, membangun jaring kemitraan usaha, meningkatkan kemampuan teknis dan 4ikukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi

Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota yakni:

1. Bupati/ Wali Kota menetapkan:
 - a. Badan/Kantor/Dinas/IJnit Kerja yang menangani Ketahan Pangan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM;
 - b. Tim Teknis Kabupaten/ Kota yang beranggotakan dan berbagai instansi terkait dan diketuai oleh Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menngam Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahan Pangan Kabupaten/Kota selaku penanggungjaab pelaksanaan Kegiatan Penguatan LDPM melaksanakan:
 - a. Penyusunan dan penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Penguatan-LDPM;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM dengan berbagai program kegiatan lintas sektor diwilayahnya;
 - c. Pertemuan Tim Tekms ditingkat Kabupaten/Kota minimal 2 kali setahun;

- d. Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM;
 - e. Pengusulan Gapoktan dan Calon Pendamping yang sudah diidentifikasi (kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi;
3. Tim Teknis Kabupaten! Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam:
- a. Sosialisasi Kegiatan Penguatan-LDPM, inventarisasi, identifikasi dan penyiapan calon kelompok sasaran (Gapoktan). Penyelesaian masalah yang dihadapi Gapoktan dalam hal pembelian, pengolahan, dan penjualan hasil produksi (gabah/beras/jagung), serta penguatan cadangan pangan;
 - b. Supervisi pelaksanaan pendampingan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pembinaan pemanfaatan dana bansos

2. Tingkat Pendamping

Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab memperkuat Gapoktan dalam;

1. Manajemen organisasi secara partisipatif (pemahaman tugas dan tanggungjawab pengurus dan anggota, mekanisme musyawarah untuk membahas masalah dan memutuskan keputusan, serta penetapan aturan dan sanksi dalam pengelolaan kegiatan nilai tambah dan pemanfaatan dana serta cadangan pangan;
2. Mumpuk modal! dana dan cadangan pangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang telah disepakati;
3. Menyusun Kegiatan Penguatan-LDPM secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan);
4. Keterampilan teknis mengelola usaha peningkatan nilai tambah dan cadangan pangan, serta keterampilan manajemen kelompok, termasuk pengelolaan keuangan dan aset kelompok secara transparan;
5. Membantu penyusunan laporan bulanan tertulis kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten! kota;

3. Tingkat Gapoktan

Pengurus Gapoktan bertanggungjawab dalam:

1. Pembelian, pengolahan, penjualan, dan pemupukan cadangan pangan, serta rehabilitasi sarana penunjang (penyimpanan gudang/lantai jemur);
2. Keberlanjutan unit usaha dan kegiatan secara mandiri dengan menetapkan aturan dan sanksi yang disepakati bersama;
3. Pembukuan secara teratur mengenai keuangan, jual beli gabah/beras/jagung, dan pengelolaan cadangan pangan;
4. Pemantauan dan pengawasan internal perkembangan administrasi keuangan dan kegiatan lainnya;
5. Pengiriman Laporan Mingguan terhadap perkembangan pelaksanaan Kegiatan Penguatan-LDPM melalui SMS (Layanan Pesan singkat) Center ke No : 0813 808 29 555 setiap Senin, sedangkan Laporan Bulanan Tertulis kepada

Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/kota.

4. Tingkat Petani

Anggota Gapoktan menjual produksi pangannya (gaba/beras/jagung) kepada Unit Usaha Gapoktan dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP untuk Gabah/Beras dan URD untuk Jagung pada saat panen raya. Pada saat paceklik anggota dapat dengan mudah mengakses pangan (Gabah atau Beras) dan Cadangan Pangan Gapoktan dan mengembalikannya sesuai kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan melalui musyawarah.

5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kriteria Gapoktan

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Penguatan LDPM adalah Gapoktan di wilayah sentra produksi padi/jagung dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dan sah;
- b. Memiliki Unit Usaha Distribusi Hasil Pertanian atau unit usaha pemasaran dan atau unit usaha penolahan FRMU yang berpengalaman dalam jual-beli (gabab/beras/jagung)), serta pengolahan (pengeringan, pembersihan, penggilingan, dan pengepakan);
- c. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama;
- d. Memiliki potensi pengembangan usaha (keinginan untuk memperluas usaha) bagi kepentingan anggota kelompok dan penguatan cadangan pangan secara mandiri dan berkelanjutan;
- e. Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
- f. Ketua Gapoktan bersedia mengirimkan Laporan Setiap Minggunya pada hari Senin ke No 0813 808 29 555 melalui SMS (Layanan Pesan Singkat) dan Laporan Bulanan Tertulis kepada Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/ kota.
- g. Jika di lokasi yang bersangkutan belum terbentuk Gapoktan yang memenuhi kriteria diatas, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh poktan yang telah dikukuhkan oleh Camat/Kepala BPPf Koordinator Penyuluh yang memenuhi kriteria diatas dan selanjutnya Poktan tersebut diarahkan berkembang menjadi Gapoktan.

6. Tahapan pelaksanaan

1. Penetapan gapoktan dan pendamping

- a. Tim teknis kabupaten/ kota melakukan inventarisasi, indentifikasi serta seleksi gapoktan dan pendamping.
- b. Tim teknis kabupaten/kota melaporkan hasil seleksi gapoktan calon penerima dan pendamping kepada kepala badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan kabupaten luwu utara.

- c. Kepala badan ketahanan dan pelaksanaan penyuluhan kabupaten luwu utara mengusulkan gapoktan calon pelaksana dan pendamping kepada kepala badan/kantor/dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi.
 - d. Tim pembina provinsi melaksanakan verifikasi gapoktan calon pelaksana/penerima dan pendamping.
 - e. Kepala badan/kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi menetapkan gapoktan calon pelaksana/penerima dan pendamping.
2. Pembinaan Gapoktan
- Tim teknis Kabupaten/kota : a) mensosialisasikan maksud, manfaat, serta dukungan kegiatan penguatan-LDPM; b) Membangun komitmen anggota gapoktan untuk melaksanakan kegiatan penguatan-LDPM secara partisipatif; dan c) menyepakati dan merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan.
- Pendamping melakukan fasilitasi sebagai berikut :
- a. Peningkatan kemampuan manajemen Gapoktan cukup ; a) rencana, b) pembukaan kegiatan pembangunan usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran, dan atau pengelolaan hasil pertanian atau usaha pemasaran dan atau pengelolaan hasil pertanian serta pengelolaan cadangan pangan. Dan c) pelaporan.
Disamping juga itu dilakukan peningkatan Kemampuan Teknis sesuai kebutuhan tentang pengelolaan komoditas dalam rangka peningkatan nilai tambah;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada alur piki kegiatan Penguatan-LDPM, yang berisi sebagai berikut:
 - a. Volume Pembelian dan Pengolahan gabab/beras/jagung dan petani anggota;
 - b. Volume gabab/beras/jagung yang akan dijual dan disimpan sebagai Penguatan Cadangan Pangan;
 - c. Kegiatan Penunjang (Penyiapan Tempat/ Gudang dan Fasilitas Penyimpanan);
 - d. Rencana Pembiayaan yang diketahui oleh penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di wilayah Gapoktan pelaksana Penerima kegiatan Penguatan-LDPM dan atau Petugas Lapangan Kecamatan setempat;
 - e. Apabila Gapoktan tidak memiliki gudang sendiri dan atau akan merehabilitasi gudang yang sudah ada diwajibkan membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu.
 - f. Pengembangan Jejaring Kemitraan Usaha Distribusi Hash Pertanian.
3. Pelaksanaan Kegiatan Gapoktan
- Penyusunan rencana usaha Gapoktan;
 - Pembuatan aturan dan sanksi bagi anggota yang menyangkut pemanfaatan sumber daya dan dan Gapoktan;
 - Pelaksanaan kegiatan Usaha Distnibusi (Pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan penjualan, serta pengeloan cadangan pangan);
 - Pembukuan kegiatan pengembangan usaha pengeloan distnibusi pangan (pembelian, pengolahan, penjualan, cadangan pangan); dan
 - Pentemuan setiap 6 bulan sekali dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengawasan internal.

7. Pembiayaan dan Pencairan Dana APBN

Pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM bersumber dan APBN Tahun Anggaran 2009 berupa dana dekonsentrasi di provinsi dan penggunaannya sesuai dengan mekanisme DIPA. Jumlah alokasi dana APBN T.A 2009 yang disalurkan sebagai dana bantuan sosial ke masing-masing Gapoktan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Nomor 01/Permentan/OT. 140/112009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2009 dan Nomor 04/Permentan/OT. 14011/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
2. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang Pencairan Dana bansos;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menertbikan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2009;
4. KPA/PPK Provinsi membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Gapoktan
5. KPA/PPK Provinsi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pembuat SPMIPenguji SPP Satuan Kerja (Satker) Lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan:
 - a. SK Penetapan Gapoktan yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Unit Kerja yang menngam Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. Rekapitulasi Rencana Usaha Gapoktan dengan mencantumkan:
 - Nama dan alamat lengkap Gapoktan penerima dana kegiatan Penguatan-LDPM;
 - Nomor Rekening Ketua Gapoktan Penerima Dana bantuan;
 - Nama dan alamat Kantor Cabang Bank tempat Gapoktan Penerima Dana Bantuan membuka rekening;
 - Rincian penggunaan dana kegiatan Penguatan-LDPM untuk pembelian (gabalberas/jagung), penyimpanan, pengolahan, dan penjualan.
 - c. Kuitansi harus ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - d. KPA/PPK Provinsi melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan melampirkan:
 - a. Ringkasan Rincian Usaha Gapoktan
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Surat Pemyataan KPA
 - e. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer Dana Penguatan-LDPM ke Rekening Gapoktan.

8. Profit Gapoktan Penenma Dana Penguatan LDPM

Di Kabupaten Luwu Utara yang ada 3 (tiga) Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Penguatan LDPM. Profil Gapoktan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Profil Gapoktan Penerima Dana Penguatan LDPM di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2009.

No	Uraian	Profil Gapoktan		
		Dandang jaya	Kaluku jaya	Karya tani
1	Nama gapoktan	2008	12 nov 2008	12 nov 2007
2	Tahun pembentukan			

3	Alamat	Ds. Dandang	Ds. Kaluku	Ds. Sukaraya
4	Jenis usaha dominan	Tan. Pangan	Tan. Pangan	Tan. Pangan
5	Ketua pengurus	Mase	Wasnu, B.Sc	Made suriana
6	Jmlh Klp tani binaan	5	3	3
7	Jumlah anggota	143	82	153
8	Luas lahan	98	134	92

Sumber Data Primer Setelah Diolah, 2010

Data diatas memperlihatkan bahwa untuk tahun anggaran 2009 di Kabupaten Luwu Utara terdapat 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani yang mendapatkan alokasi dana Penguatan LDPM yakni Gapoktan Dandang Jaya yang berlokasi di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Gapoktan Kaluku Jaya yang terdapat di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju serta Gapoktan Karya Tani yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone. Ketiga Gapoktan yang usaha dominannya adalah tanaman pangan mendapatkan bantuan dana masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,-

Dana yang dialokasikan ini dipemntukkan untuk pembelian hasil panen dan anggota gapoktan seperti gabah dan jagung pipil. Hasil panen yang dibeli dari anggota terlebih dahulu diproses karena gapoktan memiliki sarana penggilingan yang disertai lantai jemur dan gudang. Umumnya ditahun anggaran berjalan rata-rata gapoktan menyerap hasil panen anggota hanya dalam bentuk gabah karena komoditi ini yang banyak diusahakan oleh anggota gapoktan sementara jagung kurang dibudidayakan oleh anggota gapoktan.

Tabel 3. Unit Usaha Pengelolaan Penggilingan Gapoktan Penerima Dana LDPM, Tahun 2009

No	Naman Gapoktan	Komoditas	Pembelian		Penjualan	
			Volume (Kg)	Nilai (Rp.000)	Volume (Kg)	Nilai (Rp.000)
1	Kaluku jaya	Gabah	23.000	51.750.000	-	-
		Beras	-	-	13.110	65.550.000
		Jagung	-	-	-	-
2	Dandung raya	Gabah	15.000	36.000.000	-	-
		Beras	-	-	4.500	21.600.000
		Jagung	-	-	-	-
3	Karya tani	Gabah	-	-	-	-
		Beras	-	-	20.000	89.400.000
		Jagung	-	-	-	-
Jumlah		Gabah	38.000	87.750.000	-	-
		Beras	-	-	37.610	176.550.000
		Jagung	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2010

Data diatas memperlihatkan bahwa secara umum gapoktan yang bergerak pada unit usaha Distribusi/pemasaran hasil pertanian hanya menyerap gabah dan anggota gapoktan dengan harga yang layak sehingga anggota merasa untung. Hingga periode September 2010 total penjualan gabah Gapoktan sebesar Rp. 176.550.000,- Nilai ini menunjukkan bahwa masih ada dana dalam rekening gapoktan yang belum dimanfaatkan untuk pembelian gabah agar nantinya penambahan kas gapoktan bisa lebih baik.

Selain bergerak pada unit usaha distribusi/pemasaran hash pertanian gapoktan juga melakukan unit usaha pengelolaan/penggilingan padi menjadi beras. Untuk lebih rinci mengenai kegiatan tersebut dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Unit Usaha Pengelolaan/Penggilingan Gapoktan Penerima Dana LDPM, Tahun 2009

No	Naman Gapoktan	Komoditas	Pembelian		Penjualan	
			Volume (Kg)	Nilai (Rp.000)	Volume (Kg)	Nilai (Rp.000)
1	Kaluku jaya	Gabah	23.000	51.750.000	-	-
		Beras	-	-	13.110	65.550.000
		Jagung	-	-	-	-
2	Dandung raya	Gabah	7.500	18.000.000	-	-
		Beras	-	-	-	-
		Jagung	-	-	-	-
3	Karya tani	Gabah	79.788	185.962.400	-	-
		Beras	-	-	20.000	89.400.000
		Jagung	-	-	-	-
Jumlah		Gabah	109.788	255.712.400	-	-
		Beras	-	-	33.110	154.950.000
		Jagung	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2010

Data diatas menunjukkan bahwa ada kegiatan usaha yang bergerak pada gapoktan terutama dalam hal pengelolaan/penggilingan beras. Gabahgabah yang dibeli dan anggota kelompok untuk selanjutnya diolah menjadi beras dengan harapan ada nilai tambah yang dapat diperoleh. Secara total dan 3 gapoktan yang mendapatkan bantuan dana LDPM, penjualan beras yang diperoleh dan hash penggilingan padi hingga akhir September 2009 tercatat sebesar Rp. 154.950.000,-

9. Ketersediaan Pangan Dan Kegiatan LDPM

Keberhasilan kegiatan Penguatan-LDPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggran dan tingkat pusat maupun daerah.

Setelah dievaluasi selama satu tahun anggaran berjalan, maka diperoleh gambaran nyata dilapangan bahwa kegiatan LDPM mi mampu menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim. Hal mi terbukti dengan masih adanya stok gabah dan beras yang ada pada gudang gapoktan. Untuk melihat unit usaha pengembalian cadangan pangan pada masing-masing gapoktan dapat dilihat pada

No	Nama Gapoktan	Pinjaman		Pengembalian		Sisa
		Vol (Kg)	Tanggal	Vol (Kg)	tanggal	Vol (Kg)
1	Kaluku jaya	2.000	25-12-2009	205	03-34-2012	1.795
2	Dandang jaya	2.500	05-02-2010	200	05-04-2010	2.300
3	Karya tani	3.200	13-12-2009	745	22-02-2010	2.446
Jumlah		7.700		1.159		6.541

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2010.

Data pada tabel diatas memperlihatkan bahwa cadangan pangan yang tersimpan pada gapoktan pengelola dana LDPM masih cukup besar. Hal ini memungkinkan untuk mempertahankan ketersediaan pangan utamanya beras bagi masyarakat Luwu Utara, terlebih lagi saat ini telah memasuki lagi musim panen, yang memungkinkan gapoktan untuk mmenggulirkan kembali dananya untuk membeli gabah anggota gapoktan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Penguatana LDPM di Kabupaten Luwu Utara, dengan berdasar pada analisa data dan fakta di lapangan, maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan Dana LDPM yang digulirkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara dapat dikelolah dengan baik oleh 3 Gabungan Kelompok Tani.
2. Setelah dievaluasi selama satu tahun anggaran berjalan, maka diperoleh gambaran nyata dilapangan bahwa kegiatan LDPM ini mampu menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim. Hal ini terbukti dengan masih adanya stok gabah pada gudang gapoktan.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka perlu dianjurkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melihat besarnya anggota kelompok yang tergabung dalam gapoktan, maka diharapkan Dana Penguatan LDPM lebih diperbesar lagi.
2. Untuk lebih mengarabkan petam dalam usaha agribisnis Gapoktan, maka peran serta penyuluh pertanian serta instansi yang terkait lebih diintensifkan lagi demi untuk perbaikan pemasaran hasil usahataniannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2006. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonim, 2008. Pedoman Umum Pelaksana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Departemen Pertanian, Jakarta
- Ariani, M., H.P. Saliem, S.H. Suharitim, Wahida dan M.H. Sawit. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Konsumsi Pangan Rumahtangga.
- Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor
- Erwidodo, H.P. Saliem, M.Ariani dan E. Ariningsih. 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.

- Irawan, P.B dan H. Romdiati. 2000. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya Untuk Strategi Pembangunan. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 29 Februari-2 Maret. LIPI, Jakarta.
- Pusat Penelitian Agro Ekonomi. 2006. Pola Konsumsi Pangan, Proporsi dan Ciri Rumah Tangga Dengan Konsumsi Energi Dibawah Standar Kebutuhan. Kerjasama Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Depkes. dengan PAE, Deptan. Bogor.
- Nainggolan, 2008. Kinerja Pemantapan Ketahanan Pangan. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Sawit, M.H. dan M. Ariani. 2007. Ketahanan Pangan: Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya. Makalah disampaikan pada Seminar PraWKNPG VI, Bulog, Jakarta 26—27 Juni.
- Saliem, H.P.,M. Ariani, Y. Marisa dan T.B.Purwantini. 2002. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suryana,A. 2004. Ketahanan Pangan di Indonesia. Makalah pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gin VIII. Jakarta, 17-19 Mei. LIPI.